



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jl. JenderalA.Yani Kav-58 Bypass CempakaPutihTimur Jakarta Pusat

Fax. 021 26273535 / PO.BOX 1148 JKT 13011 JAT

Jakarta, 3 Oktober 2017

Nomor : 769/DJU1/KU01/10/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi
2. Para Sekretaris Pengadilan Negeri
Selaku Penanggung Jawab Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.03

Sehubungan dengan adanya surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-8533/PB/2017, tanggal 29 September 2017, perihal **Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017**. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 maka dengan ini dimohon kepada seluruh Koordinator Wilayah (005.03) untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satker di Wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut;
2. Memantau proses rekonsiliasi seluruh satker di Wilayah masing-masing melalui aplikasi *e-rekon* LK dan memastikan satker sudah upload ADK ke Aplikasi *e-rekon* LK
3. Memantau jadwal open dan close periode pada Aplikasi *e-rekon* LK
4. Memantau menu daftar pada Aplikasi *e-rekon* LK :
 - Saldo tidak normal
 - Aset Belum Diregister
 - Realisasi Tanpa Pagu
 - Pengembalian Belanja
 - Neraca Tidak Balance
 - Jurnal Tidak Lazim
5. Memastikan tidak terdapat akun persediaan berupa suku cadang, bahan baku dan beban persediaan selain barang konsumsi dan pemeliharaan;
6. Memastikan tidak terdapat pendapatan fungsional diluar DIPA 005.03.
7. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh Satuan Kerja di wilayah masing-masing berupa, LRA, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas

8. Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017
9. Mengirimkan backup aplikasi SAIBA seluruh satuan kerja di wilayah masing-masing melalui email : keuanganbadilum@gmail.com
10. Untuk point 9, pastikan ADK backup SAIBA yang diemail adalah ADK dengan status **Bar Siap Download** pada Aplikasi *e-rekon* LK.

Data-data sebagaimana pada point 8 dan 9 diterima **paling lambat kami terima pada tanggal 12 Oktober 2017.**

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,



Kurnia Ary Soelaksono, SE,SH.M.Hum
NIP. 19741205 199903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Lampiran Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor :

Tanggal : 3 Oktober 2017

Kepada Yth :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru
10. Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi
11. Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang
12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
13. Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak
14. Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya
15. Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin
16. Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda
17. Sekretaris Pengadilan Negeri Manado
18. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palu
19. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
20. Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari
21. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon
22. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar
23. Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram
24. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang
25. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura
26. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu
27. Sekretaris Pengadilan Negeri Ternate
28. Sekretaris Pengadilan Negeri Serang
29. Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
30. Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo
31. Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
32. Sekretaris Pengadilan Negeri Manokwari
33. Sekretaris Pengadilan Negeri Mamuju

Plt. Sekretaris
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,



Kurnia Amy Soelaksono, SE,SH.M.Hum

NIP. 19741205 199903 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 8533 /PB/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

29 September 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran I)
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada LKKL Semester I Tahun 2017 masih terdapat berbagai permasalahan antara lain kesalahan penggunaan akun, selisih nilai yang signifikan antara transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara yang tidak dapat ditelusuri, penjelasan yang kurang memadai atas transaksi antar entitas, hibah, persediaan dan penyisihan piutang.
2. Atas permasalahan tersebut, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi terbaik serta mencegah terulangnya permasalahan tersebut dalam LKKL Tahun 2017 (hasil telaah tiap Kementerian Negara/Lembaga disajikan pada lampiran II).
3. Sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk menyusun LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal **31 Oktober 2017**. Proses rekonsiliasi eksternal dan unggah data dalam rangka penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dapat dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d. 30 Oktober 2017 melalui aplikasi e-Rekon&LK pada situs www.e-rekon-lk.dipbn.kemenkeu.go.id. Mekanisme dan proses penyusunan disajikan dalam lampiran III.
4. LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari:
 - a. Pernyataan Telah Direviu

- b. Pernyataan Tanggung Jawab
 - c. Ringkasan Laporan Keuangan
 - d. Laporan Realisasi Anggaran
 - e. Neraca
 - f. Laporan Operasional
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas
 - h. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Selain itu, Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai satker Badan Layanan Umum agar memedomani mekanisme dan petunjuk teknis mengenai prosedur eliminasi Pendapatan BLU dari entitas Pemerintah Pusat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat K/L (lampiran IV). Dengan demikian, eliminasi transaksi BLU dalam proses konsolidasi LK BLU dengan LKKL dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NIP. 196306061983121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur seluruh Kementerian Negara/Lembaga
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
5. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-8533 /PB/2017
Tanggal : 29 September 2017

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA/WAKIL
KEPALA/DIREKTUR UMUM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif